



dppkb



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

dppkbgowa



dinasppdankbgowa@gmail.com



LAKIP 2023



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GOWA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada pasal 11, pemerintah bertanggung jawab dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Sistem pelayanan di bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11)., sesuai bagan terlampir. Dan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 56 Tahun 2016 tentang tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

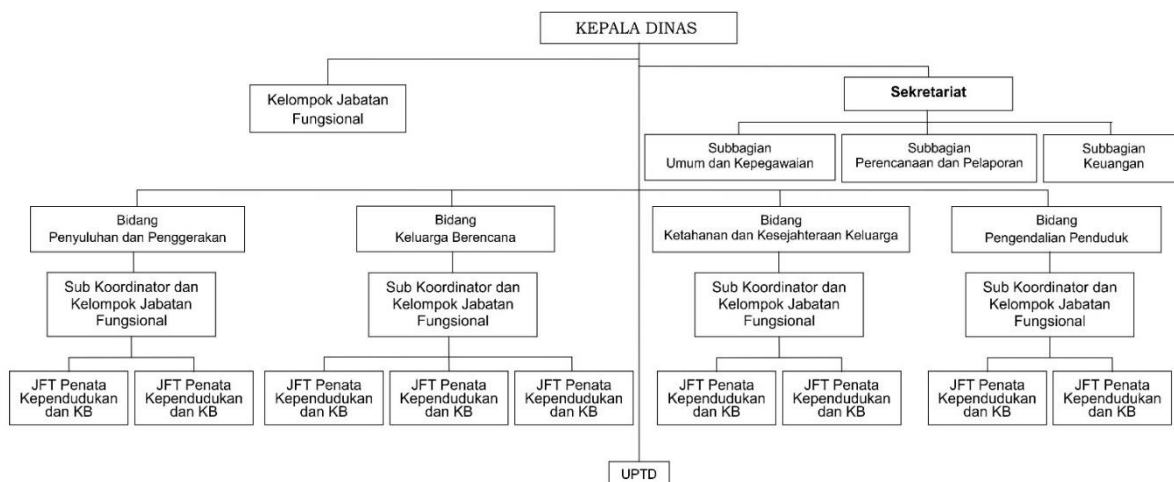
B. Gambaran Umum Organisasi

Dasar hukum pembentukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11).

Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor : 56 Tahun 2016 tentang tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan sistem pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Sumber Daya Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan program dan kegiatan didukung oleh 138 orang pegawai yang terdiri dari: 16 orang pejabat struktural (1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III, 18 orang pejabat eselon IV), 108 orang pejabat fungsional, 6 orang staf, dan 6 orang staf non ASN dan 976 kader yang terdiri dari 167 Orang PPKBD dan 809 orang Sub PPKBD sebagai Tenaga Penggerak Desa (TPD)

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagaimana tabel di bawah ini :

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan dan Staf

| No | Uraian | Eselon II | Eselon III | Eselon IV/JFT | Staf | Jumlah |
|----|--|-----------|------------|---------------|------|--------|
| 1 | Kepala Dinas | 1 | - | - | - | 1 |
| 2 | Sekretariat | - | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 3 | Bidang Pengendalian Penduduk | - | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Bidang Keluarga Berencana | - | 1 | 2 | - | 3 |
| 5 | Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat | - | 1 | 2 | - | 3 |
| 6 | Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | - | 1 | 0 | - | 1 |
| 7 | Kepala UPTD | - | - | 5 | - | 5 |
| | Jumlah | 1 | 5 | 14 | 5 | 25 |

Sumber : Bagian Umpeg Sekretariat DPPKB Gowa Tahun 2023

Kondisi Kepegawaian Pegawai Dinas PP dan KB Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

| No | Uraian | S3 | S2 | S1 | D3 | SMA | SMP | SD | JML |
|----|--------------|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|
| 1 | Kepala Dinas | | 1 | | | | | | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 2 | Sekretariat | | 2 | 6 | | | | | 8 |
| 3 | Bidang Pengendalian Penduduk | | 2 | 2 | | | | | 4 |
| 4 | Bidang Keluarga Berencana | | 1 | 2 | | | | | 3 |
| 5 | Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat | | | 3 | | | | | 3 |
| 6 | Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | 1 | | | | | | 1 |
| 7 | Kepala UPTD | | | 5 | | | | | 5 |
| | Jumlah | | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |

Sumber : Bagian Umpeg Sekretariat DPPKB Gowa Tahun 2021

Kondisi Kepegawaian PKB/PLKB Dinas PP dan KB Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

| No | Uraian | S3 | S2 | S1 | D3 | D2 | SMA | SMP | SD | JML |
|----|----------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|
| 1 | PKB/PLKB | - | 3 | 45 | 3 | | 67 | | | 118 |

Sumber : Bagian Umpeg Sekretariat DPPKB Gowa Tahun 2023

Selain Tingkat Pendidikan dan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut diatas, baik yang berada pada level top manager (Eselon II-b), middle manager (Eselon III-a), Lower manager (Eselon IV-a) serta staf pada kelompok jabatan struktural, ditambah kelompok jabatan fungsional, juga terdapat pegawai yang berada pada level non employess manager dengan sebutan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebanyak 118 orang yang ditempatkan didesa/kelurahan di Kabupaten Gowa.

C. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah perhatian program atau kebijakan fundamental yang menentukan situasi dan pilihan yang dihadapi Pemerintah Daerah pada waktu sekarang dan masa akan datang. Isu strategis ini mencerminkan persoalan yang berkepanjangan yang mempunyai dampak nyata bagi daerah yang akan diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan yang akan menentukan pencapaian tujuan Pemerintah Daerah pada masa yang akan datang.

Dalam mendukung Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa terdapat beberapa persoalan yang terjadi berbeda-beda setiap tahunnya yang menjadi isu strategis.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa berdasarkan data tahun 2023 (baseline data) yaitu:

1. Terjadi penurunan pengguna MKJP yaitu dari 21,23% pada tahun 2022 menjadi 19,84% pada tahun 2023.
2. Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (dropout) masih tinggi, yaitu 27,1 persen ini disebabkan terdapat keluhan atas penggunaan alat kontrasepsi, ada yang ingin punya anak lagi dll ;
3. Rendahnya Kualitas pelayanan KB (supply side) yang belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan dokter dalam memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB secara komprehensif termasuk mengenai efek samping alokon dan penanganannya, serta komplikasi dan kegagalan.
4. Kemampuan PKB/PLKB dan kader IMP untuk menganalisa data Program Bangga Kencana, ketidakmampuan untuk mengaplikasikan Teknik manajer dalam pelaksanaan tugas, yang berhubungan ke pendelegasian tugas.
5. Rendahnya tingkat ketrampilan kader PPKBD dan Sub PPKBD dalam melakukan komunikasi, Informasi, dan Edukasi mengenai program KKBPK, yang diakibatkan karena tidak adanya pelatihan untuk pengembangan kapasitas kinerja.

D. STRATEGI ORGANISASI

Strategi merupakan rencana yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan tertentu.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu pendukung kesuksesan Pembangunan Daerah juga menerapkan beberapa strategi baik internal organisasi maupun eksternal dengan menggali segala potensi dan kekuatan yang ada. Diharapkan strategi yang ditempuh dapat meningkatkan kinerja Dinas. Berbagai strategi yang ditempuh antara lain :

1. Mendorong kinerja para PKB/PLKB serta kader IMP dalam hal ini PPKBD dan Sub PPKBD agar semakin giat mencari Akseptor Baru agar pengguna MKJP semakin meningkat.
2. Mendorong PKB/PLKB serta kader IMP agar rutin memberikan edukasi pentingnya penggunaan alat kontrasepsi dalam hal ini menjaga angka Akseptor Aktif agar dapat dinaikkan sehingga angka drop out dapat diturunkan.
3. Rutin berkoordinasi dengan BKKBN Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan untuk mencari peluang pelatihan bagi PKB/PLKB, bagi Kader IMP, Operator Komputer di 18 kecamatan serta bidan faskes sebagai penginput, pengelola dan pelaporan data keluarga dan data pelayanan pada aplikasi yang diberikan oleh BKKBN Perwakilan untuk meminimalisasi kesalahan sehingga diperoleh data keluarga yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Berkoordinasi langsung bidan faskes dengan rutin melakukan kunjungan dan pemeriksaan untuk memastikan ketersediaan alat kontrasepsi di faskes, memantau dan memeriksa laporan pelayanan rutin ataupun pelayanan momentum di faskes.
5. Membuat MoU dengan SKPD terkait menyangkut pembinaan di Kampung KB agar target peningkatan jumlah Kampung KB Mandiri dapat tercapai.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Dalam mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah perlu disusun perencanaan kinerja. Dalam rumusan perencanaan kinerja yang akan ditempuh harus diberikan gambaran upaya-upaya untuk dapat tercapainya Visi dan Misi.

A. TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 – 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021–2026 yaitu:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja pada Tahun Ke | | | | | |
|----|---|--|--|--------|------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | MISI : 1 | Melaksanakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan | | | | | | | | |
| 1 | Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | Menurunkan Laju Pertumbuhan penduduk (LPP) | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | % | 2,03 | 1,96 | 1,59 | 1,50 | 1,50 | 1,45 |

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan

Sebagai salah satu perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibebani tugas pembangunan Daerah dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tujuan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.
2. Meningkatkan Pelayanan KB yang merata dan Berkualitas
3. Memperkuat pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembinaan kesertaan ber-KB, Kesehatan Reproduksi serta dalam pembangunan keluarga
4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta jejaring kemitraan dalam pengembangan KKBPK
5. Penguatan tata kerja dalam pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan DPP dan KB Kab. Gowa

Sasaran

Guna pencapaian tujuan tersebut, yang menjadi sasaran dari program-program kegiatan Dinas antara lain :

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan penduduk (LPP)
2. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) bagi WUS 15-49 tahun
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi modern
4. Meningkatnya angka kelahiran tercegah
5. Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need)
6. Menurunnya persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya di bawah 20 tahun
7. Meningkatnya Kampung KB
8. Meningkatnya realisasi daya serap anggaran kegiatan

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi Pencapaian kinerja.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GOWA**

| NO | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | FORMULASI | SUMBER DATA |
|----|---------|--|--------|--|------------------------------------|
| | | Persentase Angka Laju Pertumbuhan Penduduk | Persen | $mCPR = \frac{\text{Jumlah PUS yang sedang menggunakan kontrasepsi modern}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100$ | Dinas Pengendalian Penduduk dan KB |

D. PERJANJIAN KINERJA

Pada dasarnya Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa tahun 2023, dalam Penetapan Kinerja (PK) mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa dikaitkan dengan program Pernyataan Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa Tahun 2023 terdapat dalam lampiran dokumen ini. Adapun Lampiran Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Penetapan Kinerja Tahun 2023
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM | ANGGARAN |
|----|--|--|--------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 1 | Menurunnya Laju Pertumbuhan penduduk (LPP) | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | 1,50 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 3.622.056.036,- |
| | | | | Program Pengendalian Penduduk | 2.082.143.000,- |
| | | | | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 5.436.794.000,- |
| | | | | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 1.947.000.000,- |
| | TOTAL ANGGARAN | | | | 13.098.993.036 |

E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Standar Penilaian Kinerja

| No. | Nilai % | Pencapaian |
|-----|-------------------|----------------------------------|
| 1 | 110 Keatas | Sangat tercapai/ Sangat berhasil |
| 2 | $90 \leq x < 110$ | Tercapai/ Berhasil |
| L | $60 \leq x < 90$ | Cukup tercapai/ Cukup berhasil |
| 4 | $x < 60$ | Tidak tercapai/ Tidak berhasil |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengertian Akuntabilitas kinerja adalah sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Sebagai dasar Pengukuran Kinerja yang digunakan untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Akuntabilitas kinerja Tahun 2023 ada 2 (dua) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI | CAPAIAN | KET |
|--|--|-------------|-----------|---------|-------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | |
| Menurunnya Laju Pertumbuhan penduduk (LPP) | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | 1,50 | 1,56 | 96,5% | Tercapai/Berhasil |

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan (baik kuantitatif maupun kualitatif) yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan Indikator kinerja. Memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah sasaran telah tercapai. Karena itu, pencapaian sasaran dapat dilakukan dengan menilai seberapa jauh indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa telah tercapai.

Hingga akhir tahun 2023, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 - 2023

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | DATA AWAL (2021) | REALISASI KINERJA | | | CAPAIAN KINERJA | | |
|--|--|------------------|-------------------|-------|------|-----------------|-------|------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Menurunnya Laju Pertumbuhan penduduk (LPP) | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | | 1,30% | 1,56% | | 115% | 96,5% | |

Kondisi Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2022 mengalami peningkatan dimana tahun 2022 Kabupaten Gowa dapat menekan Laju Pertumbuhan Penduduk sampai dengan 1,30% dimana target untuk tahun 2023 adalah sebesar 1,50%. Namun pada Tahun 2023 terjadi penurunan capaian dimana target Tahun 2023 adalah sebesar 1,50% namun realisasi adalah 1,56% tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan angka DO (dropout) tinggi yaitu banyak peserta KB aktif yang berhenti menggunakan alat kontrasepsi MKJP, ditambah lagi angka pernikahan yang tinggi.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis

Adapun perbandingan realisasi jangka menengah dengan realisasi kinerja tahun 2023 ini digambarkan pada tabel berikut ini :

Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rensta

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET JANGKA MENENGAH | REALISASI KINERJA | | | | |
|----|--|--|------------------------|-------------------|-------|------|------|------|
| | | | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 1 | Menurunnya Laju Pertumbuhan penduduk (LPP) | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | 1,59% | 1,30% | 1,56% | | | |

Pada target jangka menengah di tentukan Persentase LPP sebesar 1,59%. Jika dibandingkan dengan 2 tahun berjalan yaitu 2022 dan 2023 Dinas Pengendalian Penduduk telah berhasil mengendalikan Laju Angka Petumbuhan Penduduk, meskipun sempat mengalami kenaikan di Tahun 2023. Untuk tahun tahun berikutnya Dinas PP dan KB optimis persentase LPP akan mengalami kenaikan kembali menuju ke angka 1,2% pada akhir tahun 2026..

4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya

Dari tiga hal yang menjadi fokus Standar Pelayanan Minimal bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota yaitu: pertama pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang meliputi cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun, cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif, cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need), cakupan anggota kelompok balita (BKB) ber-KB, cakupan PUS anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB, ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan, dan ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di setiap desa/kelurahan. Kedua, penyediaan alat dan obat kontrasepsi meliputi cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat. Ketiga, penyediaan informasi dan data mikro yang meliputi cakupan informasi data mikro keluarga di setiap desa. Kegiatan KIE memiliki banyak lingkup pelayanan.

Realisasi kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja | Standar Nasional | |
|----|--|--|-------------------|------------------|-----------|
| | | | | Target | Realisasi |
| | | | | 2023 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | | - | - |
| 1 | Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | Jumlah pelayanan KIE di 18 kecamatan | | | |
| | Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun | Jumlah Pus yang usia istrinya dibawah 20 tahun | 1041 | | |
| | Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif | Jumlah Akseptor Aktif | 86591 (71.43) | | |
| | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi | Persentase Unmeet need | 9.50% | | |
| | Cakupan anggota kelompok balita (BKB) ber-KB | Persentase Anggota Klp BKB ber-KB | 52.78 | | |

| | | | | | |
|---|--|---|-------|--|--|
| | Cakupan PUS anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB | Persentase PUS anggota UPPKA ber-KB | 78.22 | | |
| | Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan | Jumlah PKB/PLKB di 18 kecamatan | 118 | | |
| | Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di setiap desa/kelurahan | Jumlah kader IMP PPKBD dan Sub PPKBD di 18 kecamatan | 976 | | |
| 2 | Penyediaan alat dan obat kontrasepsi | Jumlah peserta KB | | | |
| | Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | Persentase terpenuhinya kebutuhan alat kontrasepsi di semua faske | 100 | | |
| 3 | Penyediaan informasi dan data mikro | Data keluarga yang valid | | | |
| | Cakupan informasi data mikro keluarga di setiap desa | Data new SIGA dan Pendataan Keluarga | 100 | | |

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Hasil pengukuran pada setiap indikator kinerja, terdapat beberapa indikator yang mengalami keberhasilan, namun juga terdapat indikator yang belum mencapai target. Beberapa penyebab keberhasilan, adalah:

- 1) Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam penggerakan Pembangunan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana);
- 2) Meningkatnya peran aktif *stakeholder* dalam Pembangunan Bangsa Kencana;
- 3) Meningkatnya intensitas pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
- 4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Bangsa Kencana.
- 5) Meningkatnya kegiatan Komunikasi Edukasi dan Informasi (KIE) tentang pembangunan Bangsa Kencana melalui berbagai media;
- 6) Meningkatnya kemudahan akses informasi bagi masyarakat terhadap pembangunan Bangsa Kencana;
- 7) Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses pelayanan KB;
- 8) Meningkatnya intensitas pembinaan ketahanan keluarga melalui kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS;
- 9) Meningkatnya kegiatan integrasi program KB dengan kegiatan lain.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Dinas Sosial dalam pelaksanaan program kegiatan.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | | % |
|--|--|---------|-----------|---------|------------------|------------------|---------|-------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Pagu | Realisasi | Capaian | |
| Menurunnya Laju Pertumbuhan penduduk (LPP) | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | 1,50% | 1,56% | 96,5% | 13.098.993.036,- | 12.739.180.505,- | 97,25% | 0,75% |

Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk mengalami penurunan dikarenakan pada anggaran belanja gaji, dilakukan penyesuaian karena banyaknya ASN yang pensiun pada saat perubahan anggaran. Nampak bahwa capaian kinerja 96,6% menggunakan anggaran 97,25% yaitu sebesar Rp. 12.739.180.505,-

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja (perjanjian kinerja)

Di bawah ini, tabel yang menjelaskan keberhasilan pencapaian kinerja :

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | RENCANA TINDAK LANJUT |
|--|--|---------|--|--|--------|-----------|---------|---------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 8 | | | |
| Menurunnya Laju Pertumbuhan penduduk (LPP) | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | 96,5% | Program Pengendalian Penduduk | Angka Kelahiran Total /TFR (%) | 2.1 | 2.2 | 97,25% | Meningkatkan capaian |
| | | | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Persentase mCPR | 65,7 | 71,43 | 108% | Mempertahankan capaian |
| | | | | Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need) | 15,25 | 9,50 | 160% | Meningkatkan lagi capaian |
| | | | | Persentase peserta MKJP | 19,55 | 21,55 | 110% | Meningkatkan lagi capaian |
| | | | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 Tahun | 28,7 | 30,1 | 96% | Meningkatkan lagi capaian |
| | | | | MUKP | 23 | 22,4 | 102% | Meningkatkan lagi capaian |

Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat 4 Program yang menjadi tugas dan tanggung jawab nya. Dari 4 Program ini terdapat 3 Program yang menyentuh langsung pencapaian sasaran kinerja Dinas PPKB, sedangkan 1 Program menjadi Program Penunjang terlaksananya Program lainnya.

Ketiga program yang mendukung pencapaian angka LPP adalah yang pertama Program Pengendalian Penduduk yang mengelola data tentang pendataan keluarga yang melahirkan data valid, melahirkan data tentang Total Fertility Rate dan data lainnya. Dengan mengetahuinya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program

pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Untuk itu dimasa yang akan datang Kabupaten Gowa melalui Dinas PP dan KB harus berusaha lebih keras untuk dapat menurunkan angka TFR nya sesuai target melalui program kegiatan yang lebih baik.

Program kedua adalah program Pembinaan Keluarga Berencana, yaitu menangani pelayanan MKJP, mCPR, distrusti alat kontrasepsi, unmeet need dan koordinasi serta pemantauan pada semua faskes di 18 kecamatan.

mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate) adalah persentase Pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern.

mCPR berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran, hal ini menunjukkan bahwa Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada di Kabupaten Gowa telah memiliki kesadaran yang baik untuk mengatur jumlah anak dalam keluarga dan atau mengatur jarak kelahiran antar anak dengan menggunakan alat kontrasepsi. Ini juga menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Gowa yang bertanggungjawab terhadap upaya pengendalian jumlah penduduk melalui para Penyuluh KB yang ada di lapangan telah berhasil memberikan pemahaman terhadap para PUS untuk dapat mengatur kesehatan keluarganya yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

mCPR juga dapat digunakan untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi yang esensial, sehingga hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Gowa tidak memiliki kendala terhadap akses pelayanan kesehatan reproduksi untuk semua jenis alat kontrasepsi modern baik Metode Kontrasepsi Jangka Pendek seperti Pil, Suntik, dan Kondom maupun untuk alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi jangka Panjang seperti IUD, Implan, Medis Operasi Pria (MOP = Vasektomi) dan Medis Operasi Wanita (MOW = Tubektomi) Semua jenis pelayanan kontrasepsi tersebut dapat diperoleh dengan cepat dan mudah oleh masyarakat Kabupaten Gowa di 31 Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Gowa. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa secara rutin setiap bulannya mendistribusikan seluruh jenis alat kontrasepsi modern kepada 31 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ada di Kabupaten Gowa.

Unmeet Need adalah Jumlah PUS yang tidak ber KB yang merupakan akumulasi dari. Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin Anak diTunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL).

Program ketiga adalah program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, yang menangani Kelompok BKB, BKR dan UPPKS yang diberikan KIE mengenai pentingnya ber-KB, menangani median usia kawin pertama buat perempuan

melalui KIE pada PIK Remaja, menangani pencegahan usia dini sehingga angka kawin di bawah 20 tahun dapat ditekan semakin rendah., juga angka kelahiran tercegah.

Angka kelahiran tercegah menunjukkan jumlah jiwa yang diperkirakan berhasil dicegah kelahirannya karena adanya penggunaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur selama satu tahun.

Semua program ini menjadi tolak ukur berhasil tidaknya menekan angka Laju Pertumbuhan Penduduk, ditambah faktor lain yang menjadi pendukung keberhasilan program Bangga Kencana.

B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 97,25% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2023

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) | | % |
|-----|--|------------------------|------------------------|---------------|
| | | Anggaran | Realisasi | |
| | Sasaran : Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.633.056.036,- | 3.315.222.543,- | 91,25% |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.513.200,- | 9.499.200,- | 99,85% |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.966.558.207,- | 2.655.993.633,- | 89,53% |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1.1525.600,- | 1.1525.600,- | 100% |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 26.200.000,- | 26.113.200,- | 99,67% |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 179.866.000,- | 179.708.231,- | 99,91% |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 24.467.000,- | 24.400.000,- | 99,72% |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 330.246.629,- | 324.879.817,- | 98,37% |
| | | 84.679.000,- | 83.102.862,- | 98,14% |
| | Program Pengendalian Penduduk | 2.082.143.000,- | 2.048.830.494,- | 98,40% |
| | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas | 18.444.000,- | 18.444.000,- | 100% |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Penduduk | | | |
| Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kot | 2.063.699.000,- | 2.030.386.494,- | 98,39% |
| Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 5.436.794.000,- | 5.428.127.468,- | 99,84% |
| Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 2.256.700.000,- | 2.256.356.468,- | 99,98% |
| Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 1.942.500.000,- | 1.934.685.000,- | 99,60% |
| Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | 1.237.594.000,- | 1.237.086.000,- | 99,96% |
| Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (KS) | 1.947.000.000,- | 1.947.000.000,- | 100% |
| Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 1.947.000.000,- | 1.947.000.000,- | 100% |
| TOTAL | 13.098.993.036,- | 12.739.180.505,- | 97,25% |

Capaian daya serap anggaran kegiatan untuk tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena :

1. Untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF) telah dilakukan antisipasi pada awal tahun 2023 dengan menerbitkan SK Parsial pengalihan anggaran pada menu yang sama untuk sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sehingga dapat terserap 99,95% dibandingkan tahun sebelumnya 2022 terserap hanya sebesar 77,89%.
2. Pada Sub Kegiatan **Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)** yang merupakan Biaya Pendampingan bagi pasangan Calon Pengantin (Catin), Pendampingan Ibu Hamil, Pendampingan Ibu Pasca Salin dan Baduta, serta Penyediaan Paket Data bagi 1770 TPK telah terserap sempurna 100% pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan pada Juknis DAK

BKKBN telah terjadi perubahan metode penyaluran transport bagi TPK yaitu dilakukan perbulan, demikian pula untuk pengadaan paket data.

Sedangkan untuk kegiatan yang tidak terserap sempurna hanya pada sub kegiatan :

Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

yang merupakan Penyediaan internet untuk Balai Penyuluhan KB di 18 kecamatan yang hanya terserap sebesar 69,18% dikarenakan masih ada Balai Penyuluhan KB yang tidak melakukan pengalihan nama untuk fasilitas internet dari nama pribadi dari Kepala atau Koordinator Balai Penyuluhan KB sehingga tidak sesuai dengan sistem pertanggungjawaban.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Capaian Organisasi

Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja suatu organisasi.

LKj Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa merupakan media komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Media ini dapat juga dipakai sebagai umpan balik (*feedback*) pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait. Dalam menjalankan tugas fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa perlu senantiasa berupaya untuk memberikan nilai tambah yang dapat menyokong upaya pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik dan aparaturnya yang profesional tersebut. Di samping itu, sesuai dengan visi dan misinya, senantiasa berkinerja produktif dalam memberikan pelayanan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berorientasi kepada stakeholder.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugasnya belum sepenuhnya berhasil, dikarenakan angka LPP mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun indikator penyusun LPP ada yang bisa melebihi target seperti MKJP, unmetneed dan mCPR yang mengalami kenaikan dan melebihi target. Namun faktor lain seperti TFR dan jumlah kelahiran bayi dari Ibu dibawah 20 tahun juga mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan namun mempengaruhi angka LPP. Ke depannya Dinas PPKB akan lebih mengoptimalkan pembinaan KIE dan pendampingan pernikahan usia dini.

B. Langkah Perbaikan Kinerja

Tahun 2023 masih merupakan tahun yang cukup memprihatinkan bagi seluruh umat di dunia tidak terkecuali di Kabupaten Gowa. Meskipun wabah pandemi Covid19 telah dinyatakan aman namun dalam hal penganggaran belum normal masih sama seperti pada tahun 2021, namun hal tersebut tidak mengurangi semangat kerja dan tekad dari seluruh Penyuluh KB dan pegawai yang ada di jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa untuk terus melaksanakan program

dan kegiatan Bangga Kencana dengan segala keterbatasan yang ada. Apa yang telah dilakukan di tahun 2023 akan menjadi pelajaran dan untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai`

Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan review terhadap dokumen Rencana Strategis agar indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
- b. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam pembangunan Bangga Kencana;
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas KIE pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi remaja;
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelompok PIK Remaja;
- e. Meningkatkan frekuensi pembinaan institusi masyarakat pedesaan, kader kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR dan BKL) dan kelompok UPPKS;
- f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kepesertaan ber-KB dengan mendorong kesertaan ber-KB MKJP dalam rangka mengurangi jumlah *Unmet Need*;
- g. Meningkatkan kegiatan KIE Bangga Kencana melalui berbagai media;
- h. Meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi dan pelayanan program KKB;
- i. Meningkatkan koordinasi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga perencanaan program, kegiatan dan anggaran lebih terukur;
- j. Lebih memperhatikan potensi masyarakat dan lingkungan agar tepat dalam menentukan target dan sasaran kedepannya;
- k. Mengadakan pelatihan, sosialisasi, bimtek dan lain-lain yang dapat meningkatkan kualitas SDM di lingkungan DPPKB Kabupaten Gowa;
- l. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi dan sinkronisasi dalam setiap pelaksanaan program kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi baik dan terbentuknya *team work* yang *solid*;
- m. Melakukan *updating* data secara lebih optimal sehingga diperoleh data yang akurat.